

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan jaman, peranan audit internal dari waktu ke waktu mengalami perubahan dengan cepat. Dalam pelaksanaan kegiatan manajemen tidak hanya mengandalkan kebijakan dan pengendalian internal, tetapi juga harus dengan bantuan dari audit internal yang dapat mengukur sejauhmana ketaatan pelaksanaan manajemen perusahaan. Peranan audit internal diharapkan oleh manajemen dapat mencurahkan perhatian pada tugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggungjawabnya (Gusnardi, 2008).

Hardyana (2013) menjelaskan peranan utama dari audit internal sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan *fraud* adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab – sebab timbulnya kecurangan. Menurut penelitian Thomas dan Clements (2002) dan Muslimat dan Kabir (2012), bahwa secara umum, auditor internal lebih senang menerima peranan aktif dalam pencegahan dan mendeteksi kecurangan. Brazel, Tina dan Gregory (2010) menemukan bahwa auditor dapat menginformasikan tentang cara untuk meningkatkan pertimbangan mereka dari penipuan. Untuk mengurangi tindakan *fraud* tersebut dibagi kedalam 3 fase: pencegahan, pendeteksian dan investigasi.

Pada masa lalu fokus utama peranan auditor internal adalah sebagai anjing penjaga (*watchdog*) dalam perusahaan, sedangkan pada masa kini dan mendatang proses internal auditing modern telah bergeser menjadi konsultan intern yang memberi masukan berupa pikiran-pikiran untuk perbaikan atas sistem yang telah ada serta berperanan sebagai katalis (Effendi, 2006). Menurut Itjen Kemdiknas (2012), peran auditor intern sebagai *watchdog* telah berlangsung sejak sekitar tahun 1940-an, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, peran auditor intern bergeser ke peran sebagai konsultan sekitar tahun 1970-an. Pergeseran paradigma tersebut dikarenakan adanya perubahan pada kebutuhan organisasi, teknologi dan kompleksitas atas aktivitas dan sistem organisasi. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, audit internal dapat membantu manajemen untuk menghindari terjadinya penyimpangan melalui kegiatan pengendalian internal (Burhani, 2010).

Untuk menjalankan tugas dengan baik, audit internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, tetapi tidak terlepas dari hubungan atasan-bawahan seperti lainnya. Namun dalam sebuah perusahaan keluarga, pemberian hak istimewa terhadap setiap karyawan yang menjadi favorit pimpinan perusahaan (pemilik perusahaan) sering menjadi hambatan tersendiri bagi pekerjaan seorang audit internal. Ebaid (2011) meneliti mengenai adanya keraguan tentang peranan audit internal sebagai mekanisme tata kelola perusahaan dan menunjukkan bahwa upaya yang luas harus dilakukan untuk meningkatkan status organisasi audit internal yang memungkinkan fungsi audit internal untuk mempertahankan objektivitas dan independensi mereka meskipun hubungan kerja dengan

manajemen dekat. Keles, Tugba dan Muhammet (2011) meneliti efek dari nepotisme, favoritisme dan kronisme yang berhubungan dengan loyalitas organisasi tentang internal sistem dalam proses audit di perusahaan bisnis keluarga di Turkey. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa nepotisme, favoritisme dan kronisme memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kepercayaan organisasi di dalam perusahaan keluarga.

Soh dan Nonna (2011) memberikan wawasan mengenai peranan dan tanggung jawab audit internal (AI) serta fungsi dan faktor-faktor yang dianggap perlu untuk menjamin efektivitasnya. Audit internal memiliki tanggung jawab untuk menilai kegiatan departemen lain dalam suatu organisasi, dan menyediakan manajemen dengan informasi yang berguna dalam menilai efektivitas operasional.

Menurut Abdulah (1993:233), pengendalian internal adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian lainnya. Evaluasi terhadap efektivitas sistem harus dilakukan. *Effectiveness*/Efektivitas menurut Pickett (2003:241) adalah konsep bottom-line didasarkan pada gagasan bahwa manajemen dapat menetapkan tujuan dan mengendalikan sumber daya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan ini sebenarnya tercapai. Nasaruddin (2008) menjelaskan kompetensi dan sumber daya manusia yang profesional akan mendukung aktivitas karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, perlu dievaluasi apakah sistem telah menggunakan sumber daya yang minimal untuk menghasilkan output yang diperlukan. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam memenangkan persaingan adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas (Setiawan, 2009).

Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan secara umum adalah suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspek baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, terampil serta berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Entjang (2000) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola berpikir seseorang. Apabila tingkat pendidikan seseorang tinggi, maka cara berpikir seseorang lebih luas.

Sistem yang efisien dan efektif, menjaga harta, dan integritas data hanya dapat dicapai jikalau manajemen membuat sistem pengendalian internal yang baik. Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes, 2012:103). Fungsi utama audit internal adalah untuk mengevaluasi proses yang berada di tempat untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat mengakibatkan *fraud* terdeteksi dan dapat dicegah. Ketika kelemahan dapat diidentifikasi audit internal melaporkan kepada manajemen untuk tindakan korektif.

Peranan audit internal pada saat ini sangat diperlukan di berbagai institusi, tidak terkecuali untuk perguruan tinggi. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, maupun jenis pendidikan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban, penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2014 menjelaskan dasar dan tujuan serta

kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi, dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi (Pasal 22,23,24,25 dan 26) dengan membentuk organisasi pengawas dan penjamin mutu di Perguruan Tinggi (Pasal 28 c, & 29 ayat 7). Pada PP tersebut menyatakan juga bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efesiensi (Pasal 33). Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud diatas meliputi bidang akademik dan bidang non akademik (Pasal 22 ayat 3).

Pada bidang non akademik, audit internal digunakan untuk pengendalian dan pengembangan mutu pendidikan tinggi. Kedudukan audit internal sebagai *supporting activity* seperti keuangan, *asset*, organisasi dan sumberdaya manusia dan kemahasiswaan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi sehingga memerlukan perhatian yang tinggi pula. Perguruan tinggi merupakan entitas ekonomi yang mengelola dana yang bersumber dari perorangan, masyarakat dan atau pemerintah oleh karenanya perguruan tinggi memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengelolaan sumber dana tersebut kepada para *stakeholder*.

Pada saat ini, biaya pendidikan di Indonesia sudah semakin tinggi terlebih institusi swasta. Semakin tinggi biaya pendidikan ditingkat perguruan tinggi menyebabkan biaya yang dikelola perguruan tinggi menjadi tidak sedikit. Untuk itu akan rawan sekali terjadinya *fraud* atau kecurangan, baik itu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) karena jumlah aset yang ada dilingkungan perguruan tinggi cukup banyak, *fraud* dalam penerimaan biaya pendidikan

mahasiswa, biaya marketing atau biaya praktik mahasiswa yang cukup tinggi juga bisa menjadi celah atau jalan untuk melakukan *fraud*. Anggaran pendidikan adalah anggaran yang paling besar di antara anggaran sektor lain. Besarnya anggaran pendidikan membuat korupsi pendidikan sulit dideteksi. Meskipun dikorupsi anggaran tersebut masih tetap bisa membiayai berbagai program pendidikan. *Fraud* atau kecurangan berpotensi menurunkan kualitas perguruan tinggi dan akan berpengaruh pada kualitas lulusan, karena mereka menjadi lulusan yang tidak berkualitas. Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perilaku penyimpangan melalui pengendalian internal (*internal control system*).

Melihat maraknya *fraud* terjadi, menurut Hardianto (2011), ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah berikut ini.

1. Adanya keteladanan dari atas dengan membangun suatu budaya jujur dan etika moral yang tinggi dimulai dari Top Manajemen.
2. Menciptakan iklim kerja yang positif.
3. Setiap karyawan baru wajib dilatih mengenai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku.
4. Manajemen perlu dengan jelas menegaskan kepada seluruh karyawan untuk memikul tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan "*code of conduct*".

Audit internal tidak akan bisa berbuat banyak tanpa dukungan manajemen. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mihret dan Aderajew (2007) di lembaga perguruan tinggi di Ethiopia menemukan bahwa efektivitas audit internal sangat

dipengaruhi oleh kualitas audit internal dan dukungan manajemen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Matarneh (2011) di bank Yordania. Model dukungan manajemen, menurut Tugiman (1997:169-170), pada umumnya adalah berikut ini.

1. Secara fungsional, pengawas internal melapor kepada direktur utama, dan secara administratif kepada dewan komisaris.
2. Pada umumnya, aktivitas audit berkaitan dengan masalah pengendalian akuntansi.
3. Pembuatan program dan pembentukan staf audit ditinjau secara dekat oleh direktur utama.
4. Pengawas internal memiliki tingkat kebebasan yang tinggi.
5. Laporan audit ditinjau secara terperinci oleh dewan komisaris dan direktur utama.

Meskipun sudah banyak sebuah perusahaan atau organisasi menggunakan jasa audit internal, namun fenomena kebocoran dan kecurangan masih sering terjadi. Pada tahun 2012 terkait kasus kredit fiktif BSM, tim audit internal Bank Syariah Mandiri menemukan pelanggaran tindak pidana perbankan yang dilakukan pegawai BSM. Hasil audit internal ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri (Rivki, 2013). Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak manajemen memberikan dukungan yang baik atas hasil laporan audit dari tim audit internal mereka, dimana peranan audit internal membantu manajemen dalam mencegah penyimpangan atau *fraud*.

Kasus pada PT. Bank Panin tahun 2009 terjadi pemecatan atau PHK terhadap seorang audit internal yang bernama Yus Rusyana, karena telah menemukan indikasi terjadinya fraud di PT. Bank Panin. Seharusnya, Yus Rusyana mendapatkan penghargaan dari PT. Bank Panin, namun malah mendapatkan pemecatan (Akuntan Online, 2013). Dari hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa Yus Rusyana mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari manajemen PT. Bank Panin dan tidak mendapat dukungan yang baik dari manajemen atas laporan hasil audit mereka sebagai audit internal.

Pengendalian internal di Indonesia terutama di lingkungan perguruan tinggi belum efektif, terbukti dengan munculnya dugaan-dugaan kasus korupsi. ICW dalam laporannya menunjukkan ada lima jenis korupsi, yakni laporan peristiwa fiktif, proyek atau perjalanan resmi, harga yang dinaikkan (*mark-up*), pemerasan, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. Selama tahun 2012 setidaknya telah ada 5 (lima) perguruan tinggi yang diduga terlibat tindakan *fraud*. Walaupun demikian, hal tersebut masih berupa dugaan sehingga prinsip asas praduga tak bersalah harus tetap ditegakkan. Tindakan *fraud* yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat diantisipasi lebih dini oleh pimpinan perguruan tinggi dengan cara mengidentifikasi jenis *fraud* yang dilakukan sehingga dapat diketahui gejala yang mungkin terjadi atas tindakan tersebut (Dewi dan Nely, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa audit internal tidak dapat berbuat banyak tanpa dukungan *top-management* perguruan tinggi.

Beberapa penelitian mengenai peranan audit internal di perguruan tinggi di beberapa negara telah dilakukan. Zakaria, Susela dan Zarina (2006) melakukan



penelitian di perguruan tinggi Malaysia dengan mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Gordon dan Fischer (1996). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar lembaga perguruan tinggi swasta di Malaysia tidak memiliki fungsi audit internal. Penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi antara manajemen di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta mengenai peran audit internal dan tidak ada perbedaan mengenai cakupan audit antara kedua tipe perguruan tinggi. Penelitian serupa dilakukan oleh Aisyah, Husaini, Halimatusyadiah dan Abdullah (2013) dengan menggunakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus BLU dan non-BLU sebagai unit analisis penelitian.

Penelitian Novatiani dan Athina (2011) dan Tarigan, Bobi dan Tomi (2013) menemukan bahwa peranan audit internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Tarigan et al. (2013) menjelaskan bahwa peran audit internal merupakan fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi, mempunyai tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Peranan audit internal adalah membantu perusahaan dalam melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas dalam sebuah organisasi. Tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal dan monitoring oleh atasan (Wilopo, 2006). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian

internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil (Adelin dan Eka, 2013). *Fraud triangle* biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai resiko kecurangan (Suprajadi, 2009). *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Yayasan Internusa adalah sebuah lembaga yang mengelola dua buah perguruan tinggi swasta kesehatan, yaitu APIKES Citra Medika dan AKBID Citra Medika. Kedua perguruan tinggi tersebut memiliki satuan fungsi audit internal yang berada dibawah ketua yayasan. Untuk menjalankan tugasnya audit internal berada diluar fungsi lini organisasi APIKES Citra Medika dan AKBID Citra Medika, dimana audit internal bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan Internusa. Dengan demikian, ruang lingkup audit internal menjadi luas dan audit internal berhak melakukan audit kepada semua pegawai atau semua bagian dibawah manajemen perguruan tinggi tersebut, yaitu manajemen APIKES Citra Medika dan manajemen AKBID Citra Medika. Melihat posisi kedudukan audit internal di Yayasan Internusa Surakarta berada dibawah ketua yayasan dan bertanggung jawab langsung kepada ketua yayasan, maka dalam melaksanakan tugas audit internal sering menemui hambatan dan sulit mendapatkan dukungan dari manajemen APIKES Citra Medika dan AKBID Citra Medika.

Fenomena tersebut diatas bisa terjadi dimungkinkan karena adanya kegagalan untuk mendesain prosedur audit internal yang efektif untuk menguji resiko, serta kegagalan untuk mengevaluasi kecukupan desain dan efektivitas pengendalian internal sebagai bagian dari prosedur audit internal. Meskipun

laporan audit disiapkan dengan baik, namun laporan tersebut hanya ditujukan kepada ketua yayasan dan salinan tidak diberikan kepada pimpinan manajemen APIKES Citra Medika dan pimpinan AKBID Citra Medika. Sehingga tidak ada mekanisme untuk tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi audit, tindak lanjut sangat penting untuk membawa hasil audit. Jika tindak lanjut lemah maka kredibilitas audit atau peranan audit internal menjadi buruk. Seberapa baik audit internal merencanakan dan melakukan audit atau mempunyai temuan yang signifikan namun jika laporan hasil audit tidak dimanfaatkan, maka kualitas profesional audit internal tidak berguna. Untuk mengatasi kesulitan dan hambatan tersebut audit internal memiliki prosedur tindak lanjut secara formal untuk memastikan bahwa hasil audit mendapatkan dukungan dan tindak lanjut baik dari yayasan, manajemen APIKES Citra Medika dan manajemen AKBID Citra Medika atas hasil rekomendasi audit.

Berdasarkan uraian diatas mengenai posisi kedudukan dan pertanggungjawaban audit internal serta prosedur tindak lanjut secara formal yang telah dibuat, peneliti ingin mengetahui apakah peranan audit internal yang ada di Yayasan Internusa mempunyai pengaruh dalam menunjang efektivitas pengendalian internal. Sejak ditemukannya *fraud* di Yayasan Internusa tahun 2011, maka Yayasan Internusa melakukan beberapa upaya pencegahan *fraud* melalui *fraud triangle*. Penelitian ini ingin mendapatkan bukti secara empiris bahwa dengan adanya upaya pencegahan *fraud* tersebut, maka akan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal Yayasan Internusa. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di manajemen Yayasan Internusa terbagi menjadi dua,

yaitu tenaga pendidik (dosen) yang mempunyai tingkat pendidikan S1/S2 dan tenaga non pendidik yang terdiri dari pengelola yayasan, staf yayasan, karyawan AKBID Citra Medika dan karyawan APIKES Citra Medika yang tingkat pendidikannya mulai dari D1-S1. Berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan dari tenaga pendidik dan tenaga non pendidik, peneliti ingin mengetahui apakah terjadi perbedaan persepsi mengenai peranan audit internal, pencegahan *fraud* dan efektivitas pengendalian internal.

Penelitian ini mengadopsi dari beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini mengadopsi penelitian dari Novatiani et al. (2011) dan Tarigan et al. (2013) mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal. Namun, penelitian ini tidak menggunakan perusahaan sebagai unit analisis seperti penelitian Novatiani et al. (2011) dan Tarigan et al. (2013). Penelitian ini merupakan studi kasus disebuah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan perguruan tinggi swasta kesehatan. Kedua, penelitian ini mengadopsi penelitian Wilopo (2006), namun pengendalian internal dijadikan sebagai variabel dependen dan pencegahan *fraud* sebagai variabel independen dengan memasukkan tiga komponen dari *fraud triangle*. Ketiga, penelitian ini mengadopsi pada penelitian Zakaria et al. (2006) dan Aisyah et al. (2013). Penelitian tidak menggunakan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta atau PTN berstatus BLU dan non-BLU sebagai unit analisis untuk mencari persepsi manajemen mengenai peran audit internal dan cakupan audit, tetapi menggunakan persepsi manajemen yang berada dibawah naungan sebuah

yayasan pendidikan yang mengelola perguruan tinggi mengenai peran audit internal, pencegahan *fraud* dan efektivitas pengendalian internal.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

1. Apakah peranan audit internal Yayasan Internusa memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal?
2. Apakah pencegahan *fraud* yang dilakukan di Yayasan Internusa memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara tenaga pendidik dan tenaga non pendidik mengenai peranan audit internal, pencegahan *fraud* dan efektivitas pengendalian internal.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, penelitian ini secara rinci bertujuan sebagai berikut ini.

1. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah peranan audit internal yang ada di Yayasan Internusa memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.
2. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah pencegahan *fraud* yang sudah dilakukan oleh Yayasan Internusa berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.

3. Untuk mendapatkan bukti apakah terjadi perbedaan persepsi mengenai peranan audit internal, pencegahan *fraud* dan efektivitas pengendalian internal antara tenaga pendidik dan tenaga non pendidik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Internusa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat bagi pihak manajemen untuk memberikan gambaran mengenai fungsi dari peranan audit internal dan pencegahan *fraud* dalam menunjang efektivitas pengendalian internal.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman lebih mengenai peranan audit internal, pencegahan *fraud* dan efektivitas pengendalian internal di perguruan tinggi.